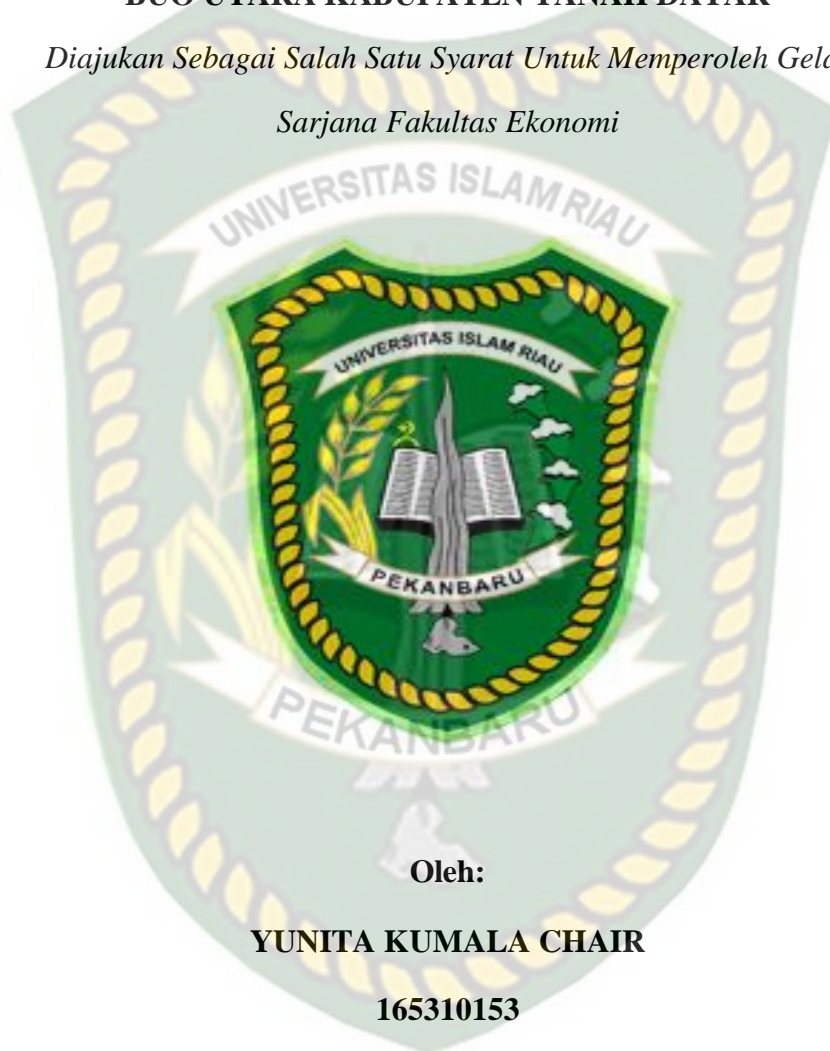


SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN DESA TANJUNG BONAI KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Fakultas Ekonomi



Oleh:

YUNITA KUMALA CHAIR

165310153

PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN DESA TANJUNG BONAI KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi yang diterapkan pada Pemerintahan Desa Tanjung Bonai sesuai atau belum dengan Pedoman Akuntansi Keuangan Desa. Jenis data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif. Semua data yang terkumpul dianalisis dan membandingkan data dengan teori relevan.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi pada Pemerintahan Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar belum sesuai dengan Pedoman Akuntansi Keuangan Desa. Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar tidak melakukan penyesuaian, tidak membuat penyusutan aset tetap, tidak membuat jumlah nominal yang sesuai pada aset dan ekuitas, dan tidak menyajikan nilai aset tetap tahun sebelumnya.

Kata Kunci: siklus akuntansi desa dan pengelolaan keuangan desa

ABSTRACT

ANALYSIS OF APPLICATION IN FINANCIAL ACCOUNTING GOVERNMENT OF THE PROPOSED VILLAGE OF LINTAU BUO UTARA DISTRICT TANAH DATAR REGENCY

This research was conducted in Tanjung Bonai Village, Lintau Buo Utara District, Tanah Datar Regency. The purpose of this study was to determine the application of accounting applied to the Village Government of Tanjung Bonai in accordance or not with the Village Financial Accounting Guidelines. Types of data and data sources used are primary data and secondary data. The data collection techniques used were interviews and documentation. The data analysis technique used is descriptive method. All data collected were analyzed and compared with relevant theories.

Based on the research and discussion that has been done, it can be concluded that the application of accounting in the Village Government of Tanjung Bonai, Lintau Buo Utara District, Tanah Datar Regency is not in accordance with the Village Financial Accounting Guidelines. Tanjung Bonai Village, Lintau Buo Utara District, Tanah Datar Regency did not make adjustments, did not depreciate fixed assets, did not make an appropriate nominal amount on assets and equity, and did not present the fixed asset value of the previous year.

Key words: *village accounting cycle and village financial management*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah SWT telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar”** skripsi ini disusun karena merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi pada fakultas ekonomi di Universitas Islam Riau. Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan, arahan dan motivasi kepada pihak yang selama ini telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Syfrinaldi, Sh., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Firdaus AR,SE.,M.Si.,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
3. Ibu Hj. Siska,SE,M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
4. Ibu Dra. Eny Wahyuningsih, M.si., CA selaku Dosen Pembimbing saya yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan masukan saran dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

6. Bapak dan Ibu Staff, Karyawan/Pegawai Tata Usaha, dan Pustaka yang telah membantu meringankan keperluan yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Luthfi S.Pd selaku Kepala Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar yang telah memberikan izin untuk meneliti dipemerintahannya. Dan Ibu Bapak perangkat desa yang telah banyak membantu saya dalam mengumpulkan data untuk penelitian.
8. Terimakasih untuk kedua orang tua saya (Alm Papa Yahya dan Mama Kusumawati) yang selalu memberikan semangat dan motivasi cinta dan kasih sayang, dan selalu mendoakan anakmu setiap waktu.
9. Terimakasih Abang Wendy, Abang Udi, Kak Ella, dan keponakanku oya yang comel telah banyak memberikan nasehat dan motivasi pada adekmu ini, yang selalu menyayangi dan mendoakan ita, semoga ita bisa menjadi anak yang berguna bagi keluarga.
10. Terimakasih untuk sahabat SMA uti, zarin, mira fika, suwik, nasri, rere, baskara, aik, dini yang telah menjadi warna hidupku selama masa sekolah sampai sekarang.
11. Terimakasih untuk sahabatku pecinta korea puspa barbar dan lia lidi yang telah menjadi pendengarku, selalu menasehatiku dan menyemangatiku ketika saat down.
12. Terimakasih untuk Tifa, Vanda, Eci, Ulfa, yola yang telah menjadi sahabatku selama 4 tahun ini kita bersama sama, selalu ada aja lelucon

yang membuatku tertawa setiap hari, yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam hidup ini dan dalam mengerjakan skripsi ini.

13. Terimakasih untuk Andrie Prayoga yang telah banyak membantu dan menyemangati dalam mengerjakan skripsi ini.

14. Kepada teman temanku angkatan 2016 yang tidak bisa kusebut satu persatu telah memberikan warna dalam masa kuliah diuir ini, terimakasih atas dukungan dalam menyusun skripsi ini.

Penulis berharap semoga allah memalsa kebaikan kepada semua piak yang telah banyak membantu penulis sampai pada tahap ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aminn...

Pekanbaru , September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	9
2.1 Telaah Pustaka	9
2.1.1 Pengertian Akuntansi	9
2.1.2 Pengertian Desa dan Pemerintah Desa	10
2.1.3 Pengertian Akuntansi Keuangan Desa	11
2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	12

2.1.5	Pihak-Pihak Pengguna Akuntansi Desa	13
2.1.6	Prinsip-Prinsip Akuntansi Desa	13
2.1.7	Siklus Akuntansi Keuangan Desa	15
2.1.8	Proses Penyesuaian	16
2.1.9	Azaz Pengelolaan Keuangan Desa	17
2.1.10	Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa	28
2.2	Hipotesis	20
BAB III	: METODE PENELITIAN	26
3.1	Desain Penelitian	26
3.2	Lokasi Penelitian	26
3.3	Jenis dan Sumber Data	26
3.4	Teknik Pengumpulan Data	27
3.5	Teknik Analisis Data	27
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
4.1	Gambaran Umum	23
4.1.1	Sejarah Singkat Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar	23
4.1.2	Struktur Organisasi Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar	25
4.1.3	Visi dan Misi Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar	25
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan	26

4.2.1	Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Pada Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar	26
4.2.2	Siklus Akuntansi pada Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar	27
1.	Tahap Pencatatan	27
2.	Tahap Penggolongan	32
3.	Tahap Pengikhtisaran	32
4.	Tahap Pelaporan	40
a.	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa	40
b.	Laporan Kekayaan Milik Desa	42
BAB V	: SIMPULAN dan SARAN	46
5.1	Simpulan	46
5.2	Saran	47
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Kondisi Pemerintahan Desa Berdasarkan Jumlah Penduduk Desa / Jenis Kelamin	23
Tabel 4.2 Kondisi Pemerintahan Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan	24
Tabel 4.3 Kondisi Pemerintahan Desa Berdasarkan Tingkat Pekerjaan.....	24
Tabel 4.4 Buku Kas Umum	28
Tabel 4.5 Buku Bank	29
Tabel 4.6 Buku Kas Pemabantu Pajak	30
Tabel 4.7 Buku Kas Pembantu Kegiatan	31
Tabel 4.8 Neraca Saldo	32
Tabel 4.9 Neraca Lajur	36
Tabel 4.10 Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.....	41
Tabel 4.11 Aset tetap yang diperoleh tahun 2017 dan 2018	43
Tabel 4.12 Persediaan yang dibeli tahun 2017 dan 2018.....	43
Tabel 4.13 Laporan Kekayaan Milik Desa	44

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Tanjung Bonai 25



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Kekayaan Milik Desa Tanjung Bonai
- Lampiran 2 Laporan Pertanggungjaaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Bonai
- Lampiran 3 Buku Bank Desa Tanjung Bonai
- Lampiran 4 Buku Pembantu Pajak Desa Tanjung Bonai
- Lampiran 5 Buku Pembantu Kegiatan Desa Tanjung Bonai
- Lampiran 6 Buku Kas Umum Desa Tanjung Bonai
- Lampiran 7 Buku Inventaris Desa Tanjung Bonai

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Instansi pemerintah yaitu organisasi yang bergerak dibidang non profit yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan kemasyarakat umum yang berupa keamanan, pelayanan kesehatan, mutu pendidikan dan lain-lain. Instansi pemerintahan mempunyai spesifik yang terkesan sebagai lembaga politik dibandingkan dengan lembaga ekonomi. akan tetapi, instansi mempunyai aspek dalam lembaga ekonomi. pemerintah mengeluarkan biaya yang besar untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan, disisi lain pemerintah juga melakukan upaya untuk memperoleh penghasilan guna untuk menutupi biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

Instansi pemerintah juga menghindari pemborosan dan hal-hal yang dapat merugikan pemerintah. Dan juga mempunyai dampak buruk bagi keuangan instansi pemerintah. Demi menjamin adanya efisien dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan desa, maka perlu adanya suatu sistem akuntansi keuangan untuk diterapkan dalam instansi tersebut. Didalam sebuah instansi sistem akuntansi dapat digunakan menjaga alat pengatur dan pengendalian untuk seluruh kegiatan keuangan diinstansi. Penerapan ini bertujuan untuk mengatur dan melindungi aset dan kekayaan milik pemerintahan desa tersebut. Dan diterapkannya sistem akuntansi keuangan untuk membantu semua aktifitas pemerintahan desa agar dapat dijalankan dengan efisien dan efektif.

Didalam pemerintah akuntansi keuangan desa merupakan sesuatu yang baru. Karena akuntansi keuangan desa adalah bagian dari bidang akuntansi sektor publik, semenjak reformasi akuntansi sering mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Dengan munculnya strategi yang baru dari pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan perubahan dari berbagai hal termasuk pengelolaan desa.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan didalam pengelolaan keuangan desa terdapat aktivitas yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 42 Tahun 2019 mengatakan bahwa Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah membuat suatu kebijakan dengan menggunakan akuntansi keuangan desa untuk mengendalikan dana desa, supaya belanja dengan baik. Akuntansi keuangan desa yaitu pencatatan dari proses transaksi yang terjadi didesa. Dan dibuktikan dari pengumpulan transaksi yang terjadi didesa beserta nota-nota, selanjutnya dilakukan pencatatan dari pelaporan keuangan sehingga bakal menghasilkan informasi dalam susunan laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan desa. Pihak-pihak yang akan menggunakan informasi dari laporan keuangan desa yaitu : 1) masyarakat, 2) perangkat desa, 3) pemerintahan desa, 4) pemerintah pusat.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP) Tahun (2015:12) Tahapan Siklus Akuntansi Keuangan Desa yaitu:

Tahap pencatatan, langkah pertama dari tahap bukti transaksi setelah itu melakukan pencatatan kedalam buku yang sesuai.

Tahap penggolongan, setelah langkah pertama tahap dimana menggolongkan bukti catatan transaksi kedalam buku besar dengan akun dan saldo yang sesuai dan dinilai kegolongan kredit dan debit.

Tahap pengikhtisaran, langkah selanjutnya melakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja.

Tahap pelaporan, dimana tahap ini tahap terakhir dari siklus akuntansi. Yang dilakukan dalam tahap ini adalah pertama, membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Kedua, membuat Laporan Kekayaan Milik Desa.

Laporan keuangan desa digunakan untuk menilai kondisi keuangan, membandingkan anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi pendapatan dan belanja, serta menilai efisiensi pemerintah dan efektifitas dan membantu memastikan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah desa untuk melaporkan kegiatan-kegiatan apa yang telah dilakukan serta hasil apa yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara struktur dan sistematis pada pelaporan untuk kepentingan transparansi, akuntabilitas, dan manajemen.

Pemerintah yang baik setidaknya mempunyai tiga point yaitu : Pertama akuntabilitas, Kedua transparansi, Ketiga partisipasi. Akuntabilitas yaitu

pertanggungjawaban kepada publik dengan semua kegiatan yang telah dilakukan. Transparansi ialah dibangun berdasarkan keterbukaan atau kebebasan dalam memperoleh informasi. Dan terakhir partisipasi menyertakan keikutsertaan masyarakat saat memutuskan hasil secara tidak langsung ataupun langsung.

Desa mempunyai peranan besar didalam tanggungjawabnya yang harus diterima, oleh karena itu pemerintahan desa harus mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dan pemerintahan desa juga harus bertanggungjawaban kepada masyarakat yang ada didesa sesuai dengan ketentuan.

Pemerintah desa harus membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Siklus pengelolaan keuangan desa, yaitu pertama tahapan perencanaan dan penganggaran, kedua tahapan, penatausahaan dan pelaksanaan, dan ketiga tahapan pertanggungjawban pengelola keuangan desa dan pelaporan.

Dasar pencatatan keuangan pada Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan basis kas (*Cash Basis*). Basis kas adalah transaksi yang dicatat atau diakui pada saat kas dikeluarkan ataupun diterima.

Proses pencatatan pada Desa Tanjung Bonai menggunakan sistem komputerisasi dan bisa diinput dengan siskeudes mulai dari sebuah transaksi yang berhubungan pembiayaan atau pengeluaran dan penerimaan. Dan bendahara Desa Tanjung Bonai melakukan pembukuan bukti transkasi yang dicatat kedalam 1) Buku Bank Desa (Lampiran 3), 2) Buku Kas Umum (Lampiran 6), 3) Buku Pembantu Pajak (Lampiran 4), 4) Buku Pembantu Kegiatan (Lampiran 5), dan 5)

Buku Inventaris Desa (Lampiran 7) selanjutnya bendahara Desa Tanjung Bonai membuat 6) Laporan Realisasi Anggaran (Lampiran 2), dan Desa Tanjung Bonai juga membuat 7) Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1).

Dalam proses akuntansi Desa Tanjung Bonai ditemukan beberapa permasalahan yaitu

Pertama dalam Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1) pada tahun 2017 terdapat aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, dan aset tetap lainnya sebesar Rp2.385.978.981 (Lampiran 2). Sedangkan pada tahun 2018 di Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1) aset tetap seperti peralatan dan mesin sebesar Rp74.549.375, gedung dan bangunan sebesar Rp1.740.169.293, jalan, jaringan dan instalasi sebesar Rp796.192.315. dan aset tetap yang dilaporkan adalah perolehan tahun 2018 tidak digabung dengan tahun 2017.

Kedua, didalam Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1) tahun 2017 jumlah aset sebesar Rp825.631.540 yang terdiri dari kas dibendahara desa sebesar Rp223.045.733 (Lampiran 6), rekening kas desa sebesar Rp602.585.807 (Lampiran 3). Sedangkan jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar Rp794.783.537 dimana pada hutang pajak didalam Laporan Kekayaan Milik Desa sebesar Rp189.091.795 (lampiran 1) sedangkan nilai hutang pajak pada Buku Kas Pembantu Pajak sebesar Rp219.939.798 (Lampiran 4). Sehingga terdapat perbedaan yang mengakibatkan jumlah aset tidak sama dengan jumlah ekuitas.

Ketiga, dalam Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1) terdapat perbedaan jumlah SAL sebesar Rp602.585.807, sedangkan pada Laporan

Realisasi Anggaran Desa (Lampiran 2) jumlah SAL sebesar Rp605.691.742. Sehingga terjadinya selisih SAL.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul : Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Pemerintahan Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah terurai diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Pemerintahan Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia-Kompertmen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP).

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun sesuai latar belakang masalah yang telah diuraikan dengan tujuan yang dilakukan penelitian ini alah untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Keuangan Pemrintahan Desa yang diterapkan pada Desa Tanjung Bonai Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia-Kompertmen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambahkan wawasan penulis, khususnya dibidang akuntansi baik secara umum maupun secara khusus. Dan dimana penulis bisa melihat secara langsung dalam praktek akuntansi pada Pemerintahan Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

2. Bagi Kantor Desa Tanjung Bonai

Hasil dari penelitian ini untuk memberikan masukan dan memperbaiki dalam penyempurnaan akuntansi keuangan pada Pemerintahan Desa Tanjung Bonai,

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan referensi untuk judul, masalah yang sama. Dan bisa juga untuk sebagai bahan perbandingan suatu informasi bagi mahasiswa.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman bagian-bagian dalam penelitian ini, maka penulis membagi bagian-bagian penelitian ini kedalam 5 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan dari proposal ini menjelaskan secara sigkat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab kedua ini menjelaskan uraian teori-teori yang telah diperoleh secara detail, berkaitan dengan permasalahan yang diatas.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga ini menguraikan metode penelitian ini seperti lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini menjelaskan sejarah singkat Desa Tanjung Bonai dan hasil dari penelitian yang dilakukan peniliti.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima ini merupakan penutup dan terdapat kesimpulan dan saran- saran yang telah dikemukakan oleh peniliti dari hasil penelitiannya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Dalam mengikuti perkembangan dari zaman ke zaman, akuntansi mengalami peningkatan perkembangan yang cukup pesat dalam kinerja maupun sistem akuntansi. Dan banyaknya pemakaian sistem akuntansi yang sesuai untuk membantu perwujudan perekonomian Negara, dan dapat dilihat dari tata keuangan pemerintahan.

Menurut Halim dan Muhammad (2014:36) akuntansi merupakan aktivitas dalam bidang jasa, yang mempunyai tugas sebagai penyaji dalam informasi kualitatif. informasi ini berisi tentang keuangan untuk mengambil keputusan ekonomi, maka dibutuhkan teknik pencatatan dan penggolongan sebuah transaksi yang berisi keuangan kedalam laporan keuangan.

Menurut Purwaji dkk (2016:6) dalam perencanaan pengambilan keputusan ekonomi diperlukannya akuntansi untuk memberikan keterangan dengan cara mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan bagaimana kondisi perekonomian pada suatu perusahaan.

Menurut Pura (2013:4) yang dimaksud akuntansi adalah suatu ilmu yang mempelajari perikayasaan dalam penyediaan jasa, yang informasinya bersifat keuangan kuantitatif dari suatu unit organisasi dan aturan penyampaian pelaporan informasi tersebut.

2.1.2 Pengertian Desa dan Pemerintah Desa

1. Pengertian Desa

Menurut UU No 6 Tahun 2014 menjelaskan pengertian desa yaitu:

Desa merupakan satuan masyarakat yang mempunyai batas daerah yang berkuasa dalam mengurus dan mengatur didalam urusan pemerintah. keperluan masyarakat, dan hak tradisonal yang harus dihormati pada pemerintahan NKRI.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 1 yang dimaksud dengan desa adalah sebagai berikut :

Desa merupakan satuan masyarakat yang mempunyai batsa daerah yang berkuasa dalam mengurus dan mengatur didalam urusan pemerintahan, keperluan masyarakat, berlandaskan praksara masyarakat, dan hak asal usul hak usul yang harus diakui pada pemerintahan NKRI.

Menurut Nurcholis (2011:2) desa merupakan dimana satu wilayah ditempati oleh orang yang sama sama mengetahui satu sama lain, saling membantu, memiliki adat istiadat yang relative serupa dan memiliki aturan sendiri didalam menjalankan aktivitas dimasyarakat.

Tunggal (2013) desa merupakan sebagai dasar masyarakat umum yang memiliki formasi asli berlandaskan hak asal usul yang beristimewa.

Menurut Bastian (2015) desa merupakan tempat bermukim penduduk diarea pedesaan yang umumnya mempunyai letak, nama, dan batas-batas wilayah dengan maksud untuk dapat memisahkan antara desa satu dan

desa lainnya. Kebanyakan ditempati dengan masyarakat yang terdiri dari sejumlah keluarga.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia desa merupakan bagian terendah didalam sistem tersebut. Dan mempunyai wewenang untuk mengerjakan dan mengatur tentang urusan keperluan masyarakat.

2. Pengertian Pemerintah Desa

Menurut Permen No 113 Tahun 2014 Penegrtian pemerintah desa adlaah : Pengelolaan dalam urusan keperluan masyarakat desa dan pemerintahan didalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah desa terdiri dari pimpinan kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa dalam penyelenggara pemerintah desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pengertian pemerintah desa adalah penyelenggara dalam kegiatan pemerintah oleh BPD dan pemerintah desa didalam mengurus dan mengatur keperluan masyarakat berlandaskan adast istiadat dan asal usul yang harus dihormati dan harus diakui oleh pemerintah NKRI.

2.1.3 Pengertian Akuntansi Keuangan Desa

Akuntansi keuangan desa yaitu transaksi yang telah berlangsung didesa meupakan bagian dari proses pencatatan. . Dan dibuktikan dari pengumpulan transaksi yang terjadi didesa beserta nota-nota, selanjutnya dilakukan pencatatan dari pelaporan keuangan sehingga bakal menghasilkan informasi dalam susunan laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan desa.

2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Menurut Sumpeno (2011:213) APBDesa adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung perkiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.

APBDesa merupakan sebagai alat instrument yang penting untuk menciptakan tata kelola yang baik bagi pemerintah dalam pengelolaan pemerintah desa. Dan tata kelola yang baik bisa dilihat dari penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDesa.

Menurut IAI-KASP Tahun 2015 APBDesa terdiri dari 3 yaitu:

1) Pendapatan Desa

Merangkum seluruh penerimaan uang dengan menggunakan rekening desa yang merupakan hak desa selama satu tahun anggaran dan desa tidak wajib membayar kemabali.

2) Belanja Desa

Seluruh pengeluaran yang melalui rekening desa merupakan kewajiban desa selama satu tahun anggaran yang tidak akan diterima penyetorannya lagi oleh desa. Belanja digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa.

3) Pembiayaan Desa

Merangkum seluruh pengeluaran yang akan diperoleh lagi atau penerimaan yang wajib dibayar lagi, baik saat tahun anggaran sekarang ataupun tahun anggaran selanjutnya.

2.1.5 Pihak-Pihak Pengguna Akuntansi Desa

IAI-KASP Tahun 2015 bagian- bagian yang membutuhkan dan selalu menggunakan informasi akuntansi diantaranya:

1. Pihak Internal

Bagian internal yaitu pimpinan kepala desa, sekretaris dan bendahara desa, dan kepala urusan atau kepala seksi.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemeriksaan pelaksanaan APBDesa.

3. Pemerintah

Dalam hal ini baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mengingat bahwa anggaran desa berasal dari APBN dan APBD melalui transfer, bagi hasil, dan bantuan keuangan

4. Pihak Lainnya

Lembaga swadaya, RT/RW merupakan pihak yang membolehkan untuk mengetahui laporan keuangan desa.

2.1.6 Prinsip-Prinsip Akuntansi Desa

Menurut IAI-KASP tahun 2015 prinsip akuntansi merupakan sebuah nilai yang harus dipatuhi dan panutan oleh pembuat satndar akuntansi. untuk membuat laporan keuangan harus mengikuti prinsip-prinsip akuntansi, agar mempermudah kepada pihak yang membaca yaitu pihak eksternal dan pihak pembuat dan melakukan bandingan dengan laporan keuangan desa lainnya.

Berikut ada lima prinsip akuntansi yaitu:

1. Prinsip Harga Perolehan

Harga perolehan dari kewajiban, pendapatan dan aset dihitung dengan harga perolehan yang cocok dari persetujuan kedua pihak yang bertransaksi/bernegosiasi. Dan harga perolehan ini dinilai secara objektif sesuai dengan uang yang dikeluarkan.

2. Prinsip Realisasi Pendapatan

Dalam pembahasan prinsip ini yaitu, tentang bagaimana menghitung dan memastikan nilai dari pendapatan yang diterima. Mengukur pendapatan bisa dilakukan dengan cara penambahan jumlah kas atau bertambahnya aset dan pengurangan utang. Pencatatan pendapatan dipemerintah desa, dilakukan saat berlangsungnya transaksi dan bisa dilihat dari besaran kas yang diperoleh.

3. Prinsip Objektif

Pada prinsip ini untuk melihat laporan keuangan harus mempunyai bukti transaksi yang ada. Kalau tidak ada bukti transaksi, maka pencatatannya tidak ada. Untuk menghindari kecurangan dalam manipulasi pencatatan dan bukti transaksi, dibutuhkan pengendalian intern dan pengawasan.

4. Prinsip Pengungkapan Penuh

Pada saat penyusunan laporan keuangan seharusnya memberitahukan informasi yang tersedia penuh. Baik kuantitatif dan kualitatif yang bisa berpengaruh dalam pengambilan keputusan.

5. Prinsip Konsistensi

Pada saat menyusun laporan keuangan wajib memiliki nilai konsistensi dalam menggunakan pedoman, standar, dan metode saat pembuatannya.

Didalam laporan keuangan harus memiliki nilai banding, artinya laporan keuangan bisa disbandingkan sama pemerintah desa lainnya menggunakan metode yang sesuai maupun kebalikannya.

2.1.7 Siklus Akuntansi Keuangan Desa

Menurut IAI-KASP Tahun 2015 tahapan siklus akuntansi berupa :

- 1) Tahap Pencatatan
Langkah pertama dari tahap bukti catatan transaksi setelah itu melakukan pencatatan kedalam buku yang sesuai
- 2) Tahap Penggolongan
Setelah langkah pertama, tahap dimana menggolongkan bukti catatan transaksi kedalam buku besar dengan akun dan saldo yang sesuai dan dinilai kegolongan kredit dan debit.
- 3) Tahap Pengikhtisaran
Langkah selanjutnya melakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja.
- 4) Tahap Pelaporan
Langkah terakhir ini, dimana tahap ini tahap terakhir dari siklus akuntansi. Yang dilakukan dalam tahap ini adalah pertama, membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Kedua, membuat Laporan Kekayaan Milik Desa.

2.1.8 Proses Penyesuaian

Ayat jurnal penyesuaian digunakan saat akhir periode dengan tujuan untuk mencocokkan taksiran saldo-saldo maupun akun nominal agar bisa memberitahukan situasi yang sesungguhnya.

Menurut Sasongko dkk (2016) ada sebagian akun yang memerlukan ayat jurnal penyesuaian diakhir periode, sebagai berikut:

1. Beban Dibayar di Muka

Adalah akun-akun yang sudah dicatat menjadi aset diawal. Namun, diharapkan sebagai beban semasa siklus operasi perusahaan.

2. Pendapatan Diterima dimuka

Adalah akun-akun yang sudah dicatat menjadi kewajiban. Namun, diharapkan sebagai pendapatan semasa siklus operasi perusahaan.

Misalnya : Pendapatan Jasa Diterima di Muka

3. Beban yang Masih Harus Dibayar

Adalah beban beban yang telah berlangsung atau kegunaannya sudah diterima/dapat bagi perusahaan. Namun, belum dibayar dan dicatat oleh perusahaan.

Misalnya : Beban telepon dan listrik pada setiap akhir bulan harus dicatat oleh perusahaan meskipun pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya karena pada bulan tersebut manfaat dari telepon dan listrik telah diterima oleh perusahaan.

4. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum dicatat karena sampai akhir bulan perusahaan belum mengirimkan faktur (*invoice*) kepada pelanggan atau pelanggan belum melunasi tagihannya.

Misalnya : Pendapatan sewa yang masih harus diterima.

2.1.9 Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola selama 1 tahun dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, asas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

a. Transparan

Yaitu dengan adanya transparansi membolehkan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang keuangan desa. Asas ini, terbuka kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang andal dengan masih mengikuti keputusan perundang-undangan dan tidak membedakan atas penyelenggaraan pemerintah desa.

b. Akuntabel

Ada pelaksanaan kewajiban mempertanggungjawabkan pengoperasian dan pengaturan sumber daya dan penerapan kebijakan dalam bentuk pencapaian target yang telah ditetapkan. Akuntabel memutuskan dalam setiap aktivitas dan hasil aktivitas pengelolaan pemerintah desa yang wajib bisa dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat yang sesuai dengan perundang-undangan.

c. Partisipatif

Yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa melibatkan masyarakat dan kelembagaan desa.

d. Tertib dan disiplin anggaran

Adalah penyelenggaraan keuangan desa eajib mengacu atas panduan atau petunjuk yang melandasinya.

2.1.10 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa

1. Sistem Pencatatan

Menurut Halim dan Muhammad (2012:44-51) adalah sebagai berikut:

Akuntansi yaitu langkah dalam mengidentifikasi, mengukur, pencatatan, dan pelaporan sebuah transaksi keuangan dalam organisasi. Tujuan dari mengidentifikasi sebuah transaksi yaitu agar bisa memisahkan antara transaksi ekonomi dengan transaksi tidak ekonomi. selanjutnya yaitu langkah pengukuran, pada langkah ini semua transaksi dinyatakan dalam satuan uang. Setelah dilakukannya pengukuran maka tahap yang dilakukan selanjutnya yaitu tahap pencatatan, ditahap ini data transaksi akan diolah dalam pengurangan/ penambahan dengan data yang sudah ada. Setelah itu tahap terakhir yang dilakukan adalah pelaporan, pada tahap ini akan memberikan hasil berupa laporan keuangan.

Menurut Halim dan Muhammad (2012:45-51) Sistem pencatatan terbagi 3 jenis yaitu:

1) *Single Entry*

Pencatatan tata buku tunggal atau *single entry*. Dimana pencatatan ini dilakukan dengan mencatat satu kali. penerimaan dicatat karena kas bertambah dan pengeluaran dicatat karena kas berkurang.

2) *Double Entry*

Pencatatan tata buku berpasangan atau *double entry*. dimana pencatatan ini dicatat dua kali. Pencatatan ini terbagi 2 sisi yaitu kredit (dikanan) dan debit (dikiri), setiap transaksi perlu memperhatikan keseimbangan dasar akuntansi.

3) *Triple Entry*

Triple entry yaitu pencatatan yang sama dengan *double entry* dan ditambah pada pencatatan buku anggaran. Jadi, pencatatan *double entry* dijalankan di pemerintahan, PPK, SKPD, maupun SKPKD juga melakukan pencatatan transaksi pada buku anggaran, sehingga berkaitan pada sisa anggaran.

2. Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa

Dasar pengakuan adalah pemilihan kapan suatu transaksi dicatat sebagai basis.

Menurut Halim dan Muhammad (2012:46-51) adalah sebagai berikut:

1) Basis Kas (*cash basis*)

Adalah pencatatan transaksi yang dilakukan ketika uang benar benar dikeluarkan atau diterima.

2) Basis Akrual (*accrual basis*)

Pada saat terjadinya transaksi dicatat tanpa mengawasi saat dikeluarkan atau diterima kas.

3) Basis Kas Modifikasian (*modified cash basis*)

Berlandaskan basis akrual transaksi ini mencatat selama setahun dan mengerjakan penyesuaian diakhir tahun anggaran.

4) Basis Akrual Modifikasian (*modified accrual basis*)

Basis kas dicatat untuk transaksi-transaksi tertentu dan basis akrual dicatat untuk sebagian besar dari transaksi.

2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Pemerintahan Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, untuk mendapatkan informasi dengan cara mengumpulkan data-data yang akan diteliti dan mewawancarai kepada pihak-pihak yang bersangkutan dikantor Desa Tanjung Bonai.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar. Dengan dasar ingin melihat penerapan akuntansi pemerintahan Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti untuk sebagai pedoman dibagi menjadi yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari kantor Desa Tanjung Bonai seperti hasil wawancara langsung dari pengurus/ pegawai tentang sejarah berdirinya , dan sistem pencatatan dilakukan oleh Desa Tanjung Bonai.
2. Data sekunder adalah data yang diterima dengan mengumpulkan data dari kantor Desa Tanjung Bonai yang telah disusun dalam format seperti Laporan Realisasi Anggaran Desa.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yaitu:

a. Wawancara

Yaitu data informasi yang didapat secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan tentang permasalahan yang dibahas mengenai sejarah, aktivitas, kebijakan operasional serta kebijakan dibidang akuntansi pada Desa Tanjung Bonai.

b. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data dan memfotocopykan semua dokumen yang diterima dari kantor Desa Tanjung Bonai seperti laporan keuangan dan sejarah desa.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam analisis data penulis menggunakan metode deksriptif dengan cara menganalisis dan membandingkan antara data yang telah dikumpul dengan teori relevan yang berkaitan dengan pembahasan untuk memecahkan permasalahan, kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Tanjung Bonai

4.1.1 Sejarah Desa Tanjung Bonai

Desa Tanjung Bonai adalah desa yang terletak di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat. Posisi Desa Tanjung Bonai berada dipertengahan antara Batusangkar dan Payakumbuh. Nagari Tanjung Bonai terdiri dari banyak tanjuang, seperti tanjuang bone, tanjuang nan ditangah, tanjuang nan ketek, dan tanjung modang.

Kondisi Pemerintahan Desa Tanjung Bonai

Berdasarkan laporan per 31 desember 2018 Desa Tanjung Bonai mempunyai jumlah penduduk 11.025 jiwa, yang terdiri dari 5.541 jiwa laki-laki dan 5.664 jiwa perempuan. Berikut rincian jumlah penduduk Desa Tanjung Bonai dari tahun 2016-2018 sebagai berikut:

1. Keadaan Sosial

Tabel IV.1

Berdasarkan Jumlah Penduduk Desa/ Jenis Kelamin

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2016	6.016	6.249	12.265
2	2017	6.036	6.017	12.053
3	2018	5.541	5.664	11.025

Sumber: Desa Tanjung Bonai

Tabel IV.2
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Tanjung Bonai

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Sekolah Dasar	621 Orang	659 Orang	1.280 Orang
2	Smp/Sltp	983 Orang	1.423 Orang	2.406 Orang
3	Sma/Slta	2.851 Orang	1.923 Orang	4.774 Orang
4	Akademi (D1-D3)	481 Orang	722 Orang	1.203 Orang
5	Sarjana (S1-S3)	802 Orang	1.002 Orang	1.804 Orang
6	Belum Sekolah	298 Orang	288 Orang	586 Orang
7	Jumlah	6.036 orang	6.017 orang	12.053 orang

Sumber : Desa Tanjung Bonai

Tabel IV.3
Berdasarkan Tingkat Pekerjaan Desa Tanjung Bonai

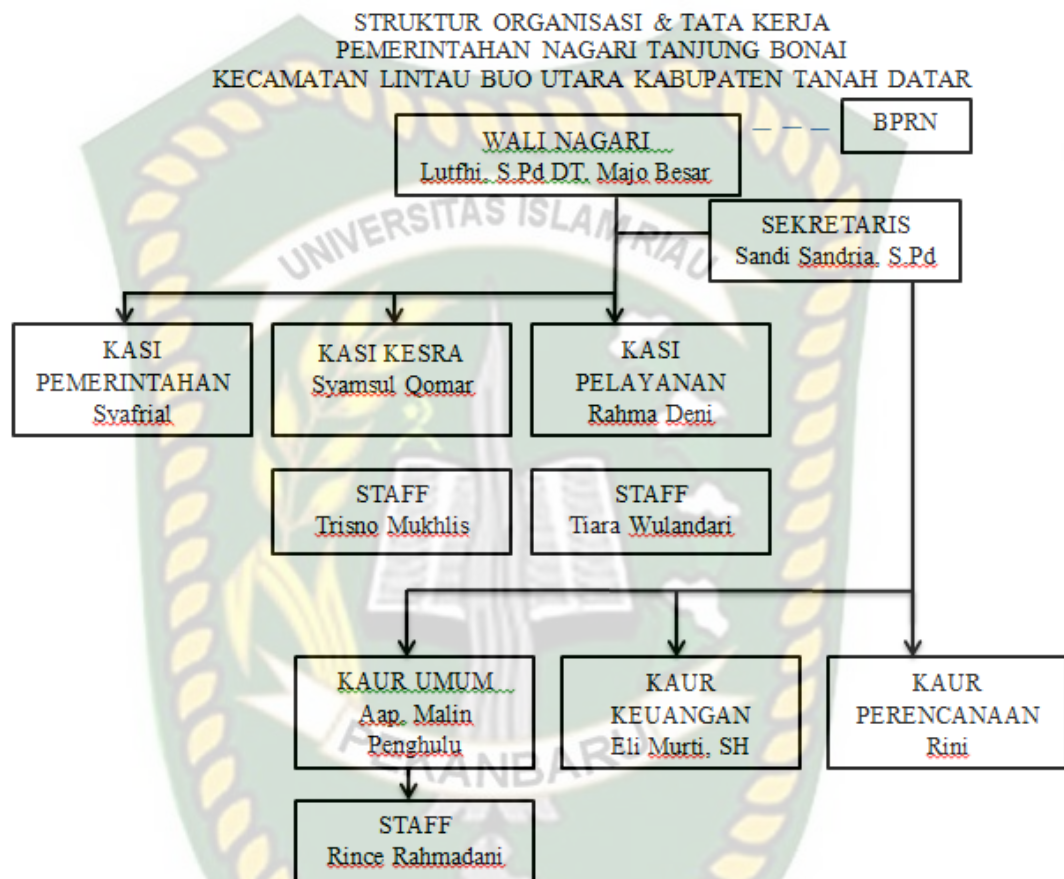
No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani	300 orang	50 orang
2	Pegawai Negeri Sipil	80 orang	70 orang
3	Ibu Rumah Tangga	-	2.405 orang
4	Perangkat Desa	30 orang	6 orang
5	Buruh Harian Lepas	35 orang	40 orang
6	Karyawan Honorer	35 orang	210 orang
7	Buruh Tani	500 orang	150 orang
8	Guru	25 orang	50 orang
9	Karyawan Swasta	5 orang	3 orang
10	Kepolisian	2 orang	-
11	Pedagang	200 orang	50 orang
12	Pensiunan	15 orang	10 orang
13	Penjahit	10 orang	5 orang
14	Tukang	500 orang	-
15	Pandai Besi	1 orang	-
16	Wiraswasta	10 orang	9 orang
17	Jumlah	1.768 orang	3.058 orang

Sumber : Desa Tanjung Bonai

2. Keadaan Ekonomi

Desa Tanjung Bonai merupakan desa yang setengah penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai buruh tani,tukang. Sementara sisanya mata pencaharian sebagai PNS, Pedagang, Perangkat desa, karyawan honorer dan lain-lain.

4.1.2 Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar



4.1.3 Visi dan Misi Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

1. Visi

Mewujudkan Nagari Tanjung Bonai yang Madani, Mandiri, Bermartabat dan Berbudaya dengan Melestarikan Nilai-nilai Luhur Adat Bersandi Syara 'Syara' Bersandi Kitabullah

2. Misi

1. Meningkatkan Iman dan Taqwa dengan menumbuhkembangkan semangat kembali ke surau
2. Meningkatkan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam membangun nagari di segala bidang
3. Melaksanakan tata kehidupan bermasyarakat sesuai dengan ketentuan adat salingka nagari
4. Menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban dengan menegakkan peraturan perundang-undangan dan hukum adat
5. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan nagari
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Sistem Pencatatan dan Dasar Pencatatan Akuntansi

Dalam sistem pencatatan yang digunakan oleh Pemerintah Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar terhadap transaksi yang telah terjadi adalah *single entry* yaitu pencatatan transaksi dilakukan hanya mencatat satu kali. Dasar pencatatannya menggunakan *cash basic* dimana dicatat pada saat menerima atau mengeluarkan kas.

Desa Tanjung Bonai telah menggunakan sistem komputerisasi (Siskuedes) aplikasi ini digunakan untuk mempermudah perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam aplikasi ini terdapat tiga langkah (a) Perencanaan terdiri

dari penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, (b) Penganggaran dibuat untuk disusun kedalam APBDesa. APBDesa ini disusun berdasarkan RKP Desa, (c) Penatausahaan yaitu transaksi yang dimasukkan kedalam BKU, Buku Bank Desa, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Kas Pembantu Kegiatan.

4.2.2 Siklus Akuntansi Pada Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

Siklus akuntansi yang dilakukan Desa Tanjung Bonai yang dikeluarkan Ikatan Akuntansi Indonesia Tahun 2015, tahap-tahap akuntansi keuangan desa sebagai berikut:

1. Tahap Pencatatan

a. Buku Kas Umum Tunai

Desa Tanjung Bonai mencatat semua transaksi yang telah dikumpulkan dan dibuktikan dengan nota-nota akan dicatat kedalam buku kas umum tunai. Pencatatan ini berdasarkan pengeluaran dan penerimaan kas. Pencatatan yang dilakukan oleh Desa Tanjung Bonai sesuai dengan Pedoman Ikatan Akuntan Indonesia-Kompertmen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP). Contoh dari transaksi yang terjadi di Desa Tanjung Bonai:

09 Maret 2018	:Pengambilan Dana dari Bank Rp.135.526.146
09 Maret 2018	:Pembayaran siltap dan tunjangan wali nagari dan perangkat Rp.127.350.000
09 Maret 2018	:Pembayaran operasional kantor Rp.751.146
09 Maret 2018	:Pembayaran belanja kegiatan musrenbang nagari Rp.7.425.000

transaksi diatas dapat dilihat kedalam format buku kas umum Desa Tanjung Bonai sebagai berikut

Tabel IV.4
Buku Kas Umum-Tunai Desa Tanjung Bonai
Tahun Anggaran 2018

No	Tgl	Rek	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	09/03/2018		Pengambilan Dana dari Bank Kas di Bendahara	135.526.146	-	0001/PNR K/13.03/2018	-	135.526.146
2	09/03/2018		Pembayaran siltap dan tujangan wali nagari dan perangkat Kas di Bendahara	-	127.350.000	0001/SPP/13.03/2018	127.350.000	8.851.146
3	09/03/2018		Pembayaran operasional Kantor Kas di Bendahara	-	751.146	0002/SPP/13.03/2018	128.101.146	8.100.000
4	09/03/2018		Pembayaran belanja kegiatan musrenbang nagari Kas di Bendahara	-	7.425.000	0003/SPP/13.03/2018	135.526146	675.000

Sumber: Desa Tanjung Bonai

b. Buku Bank Desa

Setelah seluruh transaksi secara tunai diinput kedalam BKU. Selanjutnya Desa Tanjung Bonai mencatat semua tranasaksi yang berkaitan dengan bank, baik pengeluaran maupun penerimaan kas dicatat kedalam Buku Bank Desa Pencatatan

Buku Bank Desa sesuai dengan Pedoman Ikatan Akuntan Indonesia-Kompertmen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP).

Buku Bank Desa dapat dilihat pada Tabel IV.5 sebagai berikut :

Tabel IV.5
Buku Bank Desa (Sebagian) Desa Tanjung Bonai
Tahun Anggaran 2018

No	Tanggal	Uraian Transaksi	Nomor Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01/01/2018	Saldo Awal	-	602.585.807	-	-	-	-	602.585.807
2	16/01/2018	Diterima dana BPP APM Tuanku Lintau	0001/TBP/13.03/2018	4.006.600	-	-	-	-	606.592.407
3	25/01/2018	Penyetoran silpa ADN	0007/TBP/13.03/2018	4.969.802	-	-	-	-	611.562.209
4	29/01/2018	Penyetoran silpa dan AND	0008/TBP/13.03/2018	15.000	-	-	-	-	611.577.209

Sumber : Desa Tanjung Bonai

c. Buku Kas Pembantu Pajak

Pencatatan Buku Kas Pembantu Pajak yang dilakukan oleh Desa Tanjung Bonai yang berguna dalam membantu pencatatan pengeluaran kas dan penerimaan kas pada buku kas umum yang berhubungan dengan pajak. Pencatatan Buku Kas Pembantu Pajak sesuai dengan Pedoman Ikatan Akuntan Indonesia-Kompertmen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP).

Buku kas pembantu pajak bisa dilihat pada table IV.6 sebagai berikut:

Tabel IV.6
Buku Kas Pembantu Pajak (Sebagian) Desa Tanjung Bonai
Tahun Anggaran 2018

Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018

No	Tanggal	Uraian	Pemotong an (Rp)	Penyetor an (Rp)	Saldo (Rp)
1	09/03/2018	00006/KWT/13.03/2018 Belanja makan minum Musrenbang (nasi) Pajak restoran,rumah makan	360.000	0	360.000
2	09/03/2018	00007/KWT/13.03/2018 Belanja makan minum Musrenbang (snack) Pajak restoran,rumah makan	315.000	0	675.00
3	21/03/2018	00011/KWT/13.03/2018 Belanja ATK Januari s/d maret Potongan pajak PPh pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	40.335 268.900	0 0	715.335 984.235
4	21/03/2018	00012/KWT/13.03/2018 Belanja Penggandaan Januari s/d Maret Potongan Pajak PPN pusat	132.500	0	1.116.735

Sumber : Desa Tanjung Bonai

d. Buku Kas Pembantu Kegiatan

Pencatatan agar lebih terperinci dan jelas maka pemerintahan Desa Tanjung Bonai menyajikan Buku Kas Pembantu Kegiatan, dan pencatatan ini dibuat sebagai bentuk bertanggungjawab dalam pemakaian. pencatatan Buku Kas Pembantu kegiatan sesuai dengan Pedoman Ikatan Akuntan Indonesia-Kompertmen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP).

Buku Kas Pembantu Kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel IV.7 sebagai berikut:



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel IV.7

**Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Tanjung Bonai
Tahun 2018**

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Kegiatan : 01.01 Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan

N O	Ta nggal	Uraiaan	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengemb alian KeBenda hara	Saldo kas (rupiah)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyara kat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	09/ 03/ 20 18	Pembayaran Siltap dan Tunjangan wali Nagari dan Perangkat	127.350.000	0	0001/SPP/ 13.03/2018	0	0	0	127.350.000
2	14/ 05/ 20 18	Pembayaran siltap dan tunjangan wali nagari perangkat, bendahara dan BPRN	158.775.000	0	0009/SPP/ 13.03/2018	0	0	0	286.125.000

Sumber: Desa Tanjung Bonai

2. Tahap Penggolongan

Tahap penggolongan, dimana langkah ini menggolongkan sebuah catatan bukti transaksi kedalam buku besar dengan akun dan saldo yang sesuai dan dinilai ke dalam golongan kredit dan debit. Karena Desa Tanjung Bonai menggunakan sistem komputerisasi (Siskeudes) sehingga secara otomatis sudah diposting sesuai kode akun kedalam buku besar dan buku besar pembantu. Sehingga pada pencatatan ini Desa Tanjung Bonai telah sesuai dengan Pedoman Ikatan Akuntan Indonesia-Kompertmen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP).

3. Tahap Pengikhtisaran

Tahap pengikhtisaran, dimana tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Fungsi dari membuat neraca saldo dan kertas kerja yaitu untuk memudahkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Desa. Akan tetapi Desa Tanjung Bonai belum membuat neraca saldo dan kertas kerja.

Berikut format neraca saldo yang dapat dibuat oleh Desa Tanjung Bonai.

Tabel IV.8
Neraca Saldo
Desa Tanjung Bonai
Bulan Desember 2018

Kode Akun	Nama Akun	Debet	Kredit
1110	Kas Desa		
1111	a. Rekening Kas Desa	843.258.128	
1112	b. Kas di Bendahara Desa	117.641.186	
1141	Persediaan		
1142	a. Benda Pos dan Materai		0,00
1143	b. Alat Tulis Kantor		0,00
1300	Aset Tetap		
1310	a. Tanah		0,00

1320	b. Peralatan dan mesin	74.549.375	
1330	c. Gedung dan Bangunan	1.740.167.393	
1340	d. Jalan, Irigasi, dan jaringan	796.192.315	
1350	e. Aset Tetap Lainnya	14.634.375	
1400	Dana Cadangan	0,00	
1500	Aset Tidak Lancar lainnya	0,00	
2100	Kewajiban Jangka Pendek		82.270.252
4100	Pendapatan Asli Desa		13.190.721
4200	Pendapatan Transfer:		
4210	a..Dana Desa		998.730.000
4220	b.Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah		79.902.218
4230	c. Alokasi Dana Desa		2.353.834.600
4240	d. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten		1.776.000.000
4300	Pendapatan Lain-Lain		4.006.600
5100	Belanja Bidang Penyelenggaraan Desa:		
5110	a. Penghasilan Tetap	445.500.000	
5120	b. Tunjangan	233.400.000	
5200	Belanja Bidang Pembangunan Desa:		
5210	a.Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	714.510.725	
5220	b. Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan, Irigasi	117.438.290	
5300	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:		
5310	a. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	16.620.825	
5400	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat :		
5410	a. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	34.952.250	
5500	Belanja Bidang Tak Terduga:		
	a.Kegiatan Kejadian Luar Biasa	0,00	

6100 6110	Penerimaan Pembiayaan: a. SiLPA		605.691.742
6200 6210	Pengeluaran Pembiayaan : a. Penyertaan Modal Desa	100.000.000	

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2020

a. Bahan Habis Pakai

Persediaan harus dihitung sisa persediaan yang masih ada, Bahan Habis Pakai merupakan aset lancar pada persediaan yang digunakan untuk kegiatan operasional entitas sehari-hari. Pada tahun 2018 dalam Laporan Realisasi Anggaran terdapat Bahan Habis Pakai sebesar sebesar Rp76.921.595 pada Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1) Persediaan Bahan Habis Pakai Rp. 0. Seharusnya persediaan yang belum terpakai dilaporkan dilaporan kekayaan milik desa.

b. Aset Tetap

Aset tetap yang disajikan dilaporan kekayaan milik desa yaitu peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, jaringan instalasi, nilai perolehan aktiva tetap tidak mengurangi akumulasi penyusutan sehingga tidak memberikan hasil yang sebenarnya.

Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1) tahun 2018 aset tetap seperti peralatan dan mesin sebesar Rp74.549.375, gedung dan bangunan sebesar Rp1.740.169.293, dan aset tetap lainnya sebesar Rp796.192.315. dan ditaksir umur ekonomis pada peralatan dan mesin 5 tahun, pada gedung dan bangunan 10 tahun, pada jalan, jaringan instalasi 20 tahun.

Penyusutan ditahun pertama harus memperhatikan tanggal perolehan atau tanggal pemakaian. Desa Tanjung Bonai membli aset tetap diawal tahun, sehingga perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus sebagai berikut:

a. Penyusutan Peralatan dan Mesin

$$\text{Penyusutan : } \frac{\text{Rp}74.549.375}{5 \text{ Tahun}} = \text{Rp}14.909.875$$

b. Penyusutan Gedung dan Bangunan

$$\text{Penyusutan : } \frac{\text{Rp}1.740.169.293}{10 \text{ Tahun}} = \text{Rp}174.016.929,3$$

c. Penyusutan Jalan,Jaringan dan Instalasi

$$\text{Penyusutan : } \frac{\text{Rp}796.192.315}{20 \text{ Tahun}} = \text{Rp}39.809.615,75$$

Setelah melakukan penyusutan aset tetap bendahara Desa Tanjung Bonai bisa membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian sebagai berikut:

a.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp14.909.875
	Akm. Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp14.909.875
b.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp174.016.929,3
	Akm. Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp174.016.929,3
c.	Beban Penyusutan Jalan,Jaringan dan instalasi	Rp39.809.615,75
	Akm. Penyusutan Jalan,Jaringan dan instalasi	Rp39.809.615,75

Berikut format kertas kerja yang dapat dibuat oleh Desa Tanjung Bonai.

**TABEL IV.9
NERACA LAJUR
DESA TANJUNG BONAI
TAHUN 2018**

KODE AKUN	NAMA AKUN	NERACA SALDO		PENYESUAIAN		LAPORAN REALISASI		LAPORAN KEKAYAAN DESA	
		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT
1110	Kas Desa								
1111	a.Rekening Kas Desa	843.258.128						843.258.128	
1113	b.Kas di Bendahara Desa	1117.641.186						117.641.186	
1141	Persediaan								
1142	a. Benda pos dan Materai	0,00						0,00	
1143	b.Alat tulis kantor	0,00						0,00	
1200	Investasi								
1221	a. penyertaan modal pemerintah desa	100.000.000						100.000.000	

1300	Aset Tetap								
1310	a.Tanah	0,00						0,00	
1320	b.Peralatan dan mesin	74.549.375						74.549.375	
1330	c.Gedung dan bangunan	1.740.167.393						1.740.167.393	
1340	d.Jalan, Irigasi, jaringan	796.192.315						796.192.315	
1350	e.Aset Tetap lainnya	14.634.375						14.634.375	
1400	Dana Cadangan	0,00						0,00	
1500	Aset Tidak Lancar Lainnya	0,00						0,00	
2100	Kewajiban Jangka Pendek		82.270.252						82.270.252
4300	Pendapatan asli Desa		13.190.721				13.190.721		
4200	Pendapatan Transfer:								
	a. Dana Desa		998.730.000				998.730.000		
	b.Bagian dari Hasil Pajak daerah		79.902.218				79.902.218		
4210									
4220	c. Alokasi Dana Desa		2.353.834.600				2.353.834.600		
4230	d.Bantuan Keuangan APBD Kabupaten		1.776.000.000				1.776.000.000		
4240									
4300	Pendapatan Lain-Lain		4.006.600				4.006.600		

5100	Belanja Bidang Penyelenggaraan								
5110	Desa:								
	a. Penghasilan Tetap		445.500.000			445.500.000			
5120	b. Tunjangan		233.400.000			233.400.000			
5200	Belanja Bidang Pembangunan Desa:	714.510.725				714.510.725			
	a.Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan								
5210	b.Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Dan Irigasi	117.438.290				117.438.290			
5220									
5300	Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat:								
	a. Kegiatan Pembinaan Kententraman dan Ketertiban	16.620.825				16.620.825			
5310									
5400	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat:								
	a.Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.952.250				34.952.250			
5410									
5500	Belanja Bidang Tak Terduga:								

5510	a.Kegiatan Kejadian Luar Biasa	0,00				0,00			
6100 6110	Penerimaan Pembiayaan: a.SiLPA		605.691.742				605.691.742		
6200 6210	Pengeluaran Pembiayaan: a.Penyertaan Modal Desa	100.0000.000				100.000.000			

Sumber :Data Olahan Penulis Tahun 2020



Maka dapat disimpulkan Desa Tanjung Bonai belum melakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Sehingga, Desa Tanjung Bonai belum sesuai dengan Pedoman Ikatan Akuntan Indonesia-Kompertmen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP).

4. Tahap Pelaporan

Pada proses tahap terakhir ini adalah membuat Laporan Keuangan. Desa Tanjung Bonai membuat laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa (Lampiran 2) dan Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1) sebagai berikut :

a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan ini meliputi informasi anggaran dan realisasi selama satu periode pelaporan dan akan dibandingkan dengan anggaran APBDesa untuk melihat selisih lebih atau kurangnya anggaran desa.

Pada Desa Tanjung Bonai Terdapat pemasalahan SAL dimana di Laporan Realisasi Anggaran, seharusnya SAL ini bersaldo Rp 0, tetapi pada Desa Tanjung Bonai terdapat selisih dari SAL tersebut. Secara anggaran selisih tersebut belum digunakan untuk pengeluaran pembiayaan atau membiayai belanja daerah. Atau anggaran tersebut bisa diperuntukan dalam program pembangunan didaerah. Dan selisih ini sering terjadi di kantor desa, dari sisa anggaran tersebut akan disetor diawal tahun yang disesuaikan dengan rekening tahun berikutnya.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa telah dibuat oleh Desa Tanjung Bonai dan sudah sesuai dengan Pedoman Ikatan Akuntan Indonesia-Kompertmen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP).

Tabel IV.10
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Tanjung Bonai
Tahun Anggaran 2018

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (kurang) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Nagari	13.700.000	13.190.721	509.279
1.1.1.	Hasil Usaha Nagari	2.500.000	2.500.000	0
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	11.200.000	10.690.721	509.279
1.2.	Pendapatan Transfer	5.217.059.300	5.208.466.818	8.592.482
1.2.1.	Dana Nagari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Alokasi Dana Nagari	998.730.000	998.730.000	0
1.2.2.	Bantuan	88.494.700	79.902.218	8.592.482
1.2.3.	Keuangan APBD Kabupaten	2.353.834.600	2.353.834.600	0
1.2.4.	Bantuan	1.776.000.000	1.776.000.000	0
1.3	Pendapatan Lain-Lain	4.006.600	4.006.600	0
1.3.1	Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	4.006.600	4.006.600	0
	Jumlah Pendapatan	5.234.765.900	5.225.664.139	9.101.761
2.	BELANJA			
2.1.	Belanja Nagari	5.740.457.642	4.859.316.551	881.141.091
2.1.1.	Belanja Pegawai	737.358.000	683.431.409	53.926.591
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.974.200.950	1.550.339.784	423.861.166
2.1.3.	Belanja Modal	3.028.898.692	2.625.545.358	403.353.334
	JUMLAH BELANJA	5.740.457.642	4.859.316.551	881.141.091
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(505.691.742)	366.347.588	(872.039.330)
3.	PEMBIAYAAN			

3.1.	Penerimaan Pembiayaan	605.691.742	605.691.742	0
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	605.691.742	605.691.742	0
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000	100.000.000	0
3.2.2.	Penyertaan Modal desa	100.000.000	100.000.000	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN	505.691.742	505.691.742	0
	SISA LEBIH (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0	872.039.330	(872.039.330)

Sumber: Desa Tanjung Bonai

b. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan ini digunakan untuk mengetahui seluruh kekayaan desa seperti aset, kewajiban dan ekuitas diakhir periode dan penyajian Laporan Kekayaan Milik Desa. Tetapi Desa Tanjung Bonai terdapat beberapa permasalahan dimana terjadinya salah pencatatan atau penginputan didalam laporan kekayaan milik desa tahun 2017, sehingga tidak balance antara total aset dan total kewajiban dan ekuitas. Seharusnya Desa Tanjung Bonai menyajikan saldo hutang pajak sebesar Rp219.939.798 yang sesuai dengan data pada buku pembantu pajak (lampiran 4) dan membuat jurnal koreksi sebagai berikut:

Beban pajak Rp219.939.798

Utang pajak Rp219.939.798

Dan permasalahan selanjutnya Desa Tanjung Bonai Tidak melakukan penyusutan pada aset tetap, dan aset tetap tahun 2017 tidak digabungkan di tahun

2018. Seharusnya Desa Tanjung Bonai menyajikan penyusutan didalam laporan kekayaan milik desa. Berikut contoh laporan kekayaan milik desa table IV.13

Tabel IV.11
Aset Tetap yang diperoleh tahun 2017 dan 2018

KETERANGAN	2017	2018
<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan 	340.747.459 115.492.890	427.214.605 58.559.875
<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Jalan, Irigasi, dan Jaringan Gedung dan Bangunan 	1.379.329.882 477.843.750	796.192.315 1.312.954.688
<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Alat Kantor dan Rumah Tangga Barang Bercocok Seni dan Kebudayaan 		15.989.500 14.634.375
<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pemberdayaan Masyarakat Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya 	42.370.000 30.195.000	
TOTAL	2.385.978.981	2.625.545.358

Sumber: Data Olahan Penulis 2020

Pada tabel IV.11 diatas jika aset tetap tahun 2017 digabungkan dengan aset tetap tahun 2018 didalam laporan kekayaan milik desa. Maka akan menambahkan nilai kekayaan bersih pada laporan kekayaan milik desa tahun 2018.

Tabel IV.12
Persediaan yang dibeli tahun 2017 dan 2018

KETERANGAN	2017	2018
<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Cetak dan Pengadaan 	29.729.223 11.437.000	25.788.965 21.527.075
<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Belanja Bahan Pakai Habis 		7.100.000
<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan/Material 	17.738.050 3.500.000	20.352.000
<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pemberdayaan Masyarakat Belanja Bahan Pakai Habis 	13.785.980	23.680.630
TOTAL	76.190.253	98.448.670

Sumber: Data Olahan Penulis 2020

Pada table IV.12 diatas terdapat pencatatan nilai persediaan yang dibeli oleh Desa Tanjung Bonai pada tahun 2017 dan 2018, seharusnya pemerintah desa tanjung bonai membuat buku pencatatan persediaan. Dimana buku ini mencatat setiap nilai persediaan yang dibeli (Debet) dan nilai penggunaan persediaan (Kredit). nilai persediaan yang belum digunakan pada akhir tanggal pelaporan merupakan selisih antara dari penambahan dan pengurangan nilai persediaan .

Tabel IV.13
Laporan Kekayaan Milik Desa
Tahun 2018

URAIAN	TAHUN 2018 (Rp)	TAHUN 2017 (Rp)
I. ASET		
ASET LANCAR		
1. Kas Desa	1.003.840.888	802.631.540
a. Kas Dibendahara Desa	160.582.760	223.045.733
b. Rekening Kas Desa	843.258.128	602.585.807
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah	0	0
b. Piutang Sewa Gedung		
c. dst		
3. Persediaan		
a. Alat tulis kantor	0	0
b. Meterai		
c. dst		
JUMLAH ASET LANCAR	1.003.840.888	802.631.540
INVESTASI		
Penyertaan Modal Pemerintah Desa	100.000.000	0
JUMLAH INVESTASI	100.000.000	0
1. Aset Tetap		
a. Tanah	0	0
b. Peralatan dan Mesin	74.549.375	161.276.250
Akumulasi	(14.909.875)	
c. Gedung dan Bangunan	1.740.169.293	893.191.350
Akumulasi	(174.016.929,3)	
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	796.192.315	1.632.952.079
Akumulasi	(39.809.615,75)	

e. Aset Tetap Lainnya Akumulasi	14.634.375 (2.926.875)	30.500.000
JUMLAH ASET TETAP	2.393.882.062,95	2.17.919.679
JUMLAH ASET	3.497.722.950,95	3.520.551.219
II. KEWAJIBAN		
A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
1. Hutang Perhitungan Pihak Ketiga		
2. Hutang Bunga		219.939.798
3. Hutang Pajak	129.849.046	
4. Pendapatan Diterima Muka	5.427.020	
5. dst.....		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	135.276.066	219.939.798
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN (A+B)	135.276.066	219.939.798
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I-II)	3.362.446.884,95	3.300.611.421

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

*diasumsikan

Maka dapat disimpulkan Laporan Kekayaan Milik Desa Tanjung Bonai belum sesuai dengan Pedoman Ikatan Akuntan Indonesia-Kompertmen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP).

BAB V

SIMPULAN DAN PENUTUP

Pada Bab V ini penulis menyimpulkan dan memberi saran kepada pembaca dari hasil penelitian yang diteliti dan dijelaskan pada Bab IV.

5.1 Simpulan

1. Sistem pencatatan yang digunakan pada Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar adalah *single entry*. Dan dasar pencatatan menggunakan *cash basis*.
2. Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar tidak melakukan perhitungan pada persediaan dan penyusutan pada aset tetap.
3. Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar pada tahap pelaporan tidak mencantumkan nilai aset tahun sebelumnya pada Laporan Kekayaan Milik Desa.
4. Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar pada tahap pelaporan terdapat perbedaan selisih SAL antara Laporan Realisasi Anggaran dengan laporan kekayaan milik desa
5. Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar diLaporan Kekayaan Milik Desa terjadi perbedaan antara jumlah total dengan jumlah total kewajiban dan ekuitas.

6. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan pada Desa Tanjung Bonai belum sesuai Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Tahun 2015.

5.2 Saran

1. Sebaiknya Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar mengikuti sesuai dengan siklus akuntansi yaitu tahap pencatatan, tahap penggolongan, tahap pengikhtisaran, dan tahap pelaporan.
2. Sebaiknya Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar pada tahap pengikhtisaran tidak melakukan perhitungan jumlah persediaan dan perhitungan jumlah penyusutan aset tetap. Perhitungan tersebut dilakukan untuk mengetahui secara detail nilai angka yang sesungguhnya pada laporan kekayaan milik desa.
3. Pada tahap pelaporan, Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara sebaiknya melakukan penyesuaian terhadap aset lancar dan mencantumkan aset tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun sekarang maupun tahun sebelumnya, agar terlihat jumlah kekayaan bersih sesungguhnya.
4. Pada tahap pelaporan Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar sebaiknya menerapkan sistem akuntansi pada pembuatan laporan keuangan sehingga laporan yang disajikan lebih akurat dan tidak terjadi salah saji informasi.

5. Sebaiknya Desa Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Tahun 2015.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2015. Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi, 2012, Teori, Konsep, dan Aplikasi : Akuntansi Sektor Publik . Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta: Erlanga
- Pura, Rahman. 2013.Pengantar Akuntansi 1 Pendekatan Siklus Akuntansi. Jakarta: Erlangga
- Purwaji, Agus dkk. 2016. Akuntansi Biaya. Jakarta: Salemba Empat.
- Sasongko, Catur dkk.2016. Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta : Salemba Empat
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh: Read Indonesia
- Tunggal, Amin Widjaja. 2013. Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan Akuntansi. Jakarta: Harvarindo.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Kompartemen ASP: Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Tanah Datar No 42 Tahun 2019. Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.
- Undang-undang No 6 Tahun 2014. Tentang Desa